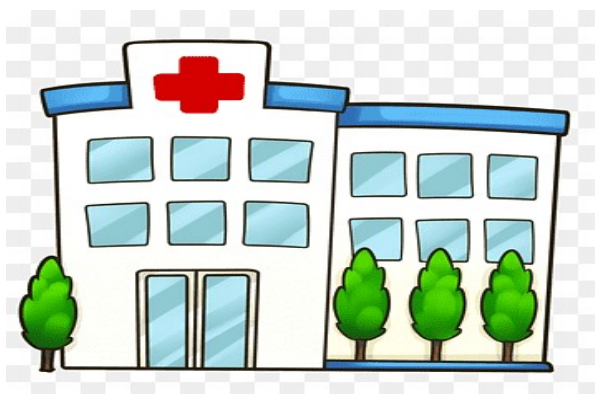


DPRD DORONG KEBIJAKAN AFIRMASI BAGI RSUD HAULUSSY



Sumber gambar: <https://www.pngwing.com/id/free-png-bdwsj>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong adanya kebijakan afirmasi bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy. Kebijakan afirmasi tersebut, bertujuan untuk kembali menata rumah sakit ini, yang dikelola secara serampangan oleh direktur sebelumnya. DPRD Provinsi Maluku terus memberikan perhatian bagi peningkatan pelayanan di RSUD dr. M. Haulussy, termasuk dalam kebijakan anggaran. “Kondisi RSUD dr. M. Haulussy yang sangat memprihatinkan dengan manajemen yang amburadul ini, membutuhkan adanya perhatian dan kebijakan afirmasi dari Pemerintah Provinsi,” ungkap Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang.

Johan Lewerissa mengaku, manajemen RSUD dr. M. Haulussy saat ini sementara melakukan pembenahan, baik dari aspek pelayanan maupun tata kelola manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), tetapi tidak dapat dilakukan sendiri. Pembenahan RSUD dr. M. Haulussy membutuhkan intervensi pemerintah provinsi, apalagi dengan persoalan hutang yang mengganggu pelayanan di rumah sakit. “Untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka aspek yang harus diperhatikan juga adalah anggaran bagi RSUD dr. M. Haulussy untuk dapat di tingkatkan,” ucap Johan Lewerissa.

Tak hanya soal anggaran, menurutnya, SDM juga harus menjadi perhatian serius agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Untuk itu, Ia memastikan, kedepan DPRD Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, agar ada kebijakan afirmasi bagi RSUD dr. M. Haulussy. “Kenapa kita harus dorong ini pada RSUD dr. M. Haulussy, tujuannya agar masyarakat bisa berobat dan mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi, karena selama ini RSUD dr. M. Haulussy sebagai rumah sakit rujukan tidak berfungsi dengan baik, maka ini harus diperbaiki,” tandasnya.

Sumber berita:

- 1. Harian Siwalima, “DPRD Dorong Kebijakan Afirmasi bagi RSUD Haulussy”, 09 Desember 2024; dan***
- 2. Harian Siwalima, “Lewerissa: Kebijakan Afirmasi bagi RSUD Haulussy Harus Didorong”, 11 Desember 2024.***

Catatan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan antara lain untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan, dan menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien. Penyelenggaraan Kesehatan terdiri dari Upaya Kesehatan, Sumber Daya Kesehatan, dan pengelolaan Kesehatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan.